

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Siagian (1994), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Kebijakan otonomi daerah mengharuskan setiap daerah dapat memacu pembangunan untuk meningkatkan kemajuan disegala bidang khususnya meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya, karena semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan bertambah pula aktivitas suatu daerah sehingga dibutuhkan pula penyediaan kebutuhan lahan yang sesuai.

Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun disertai dengan meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan fasilitas yang tersedia tidak dapat bekerja secara optimal. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mendapat pelayanan fasilitas dengan baik dan terjangkau. Oleh karena itu, dibutuhkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang merata yang sesuai kebutuhan dan terjangkau pelayanannya oleh seluruh aktivitas masyarakat. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

Pembangunan pendidikan masih menjadi salah satu fokus pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sarana pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan penyediaan sarana pendidikan yang mendidik dan sesuai dengan kebutuhan penduduk. Keberhasilan dari keberadaan suatu fasilitas sosial dapat dilihat dari minat dan kesediaan penduduk di suatu wilayah dalam memanfaatkan fasilitas sosial tersebut. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan bagi penduduk suatu wilayah untuk memfasilitasi aktivitas kehidupan sehari-hari. Fasilitas pendidikan menjadi prioritas penunjang dalam melengkapi kebutuhan infrastruktur sosial di suatu pemukiman. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, pendidikan merupakan hal yang menjadi prioritas utama dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan fasilitas

pendidikan yang memadai. Dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai maka dapat menunjang kualitas belajar siswa dan dapat bersaing dengan perkembangan teknologi di jaman sekarang.

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan diantaranya ditunjukkan oleh indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di setiap jenjang pendidikan. APK menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan keseluruhan penduduk usia pada jenjang tersebut. Sedangkan APM menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya dengan keseluruhan usia sekolah pada jenjang tersebut (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tegal, 2016). Pembangunan pendidikan masyarakat di Kecamatan Dukuhwaru dapat dilihat dari besarnya APK dan APM serta jumlah sekolah pada masing-masing jenjang yang akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

**TABEL I. 1**  
**APK, APM dan Jumlah Sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan di Kecamatan Dukuhwaru Kab. Tegal Tahun 2016**

No	Tingkat Pendidikan	APK		APM		Jumlah Sekolah
		Kinerja	Target	Kinerja	Target	
1	SD/MI	111,52%	112%	101,01%	98,93%	36 unit
2	SMP/MTs	67,15%	97,28%	54,34%	91,65%	6 unit
3	SMA/SMK	135,93%	62,85%	107,04%	58,04%	5 unit

*Sumber : BPS Kab Tegal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, 2016*

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan lebih difokuskan pada pendidikan jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru. Hal ini dikarenakan, nilai APK dan APM masih jauh dibawah target. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru hanya mencapai 67,15% dan Angka Partisipasi Murni (APM) 54,34%. Dimana target Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah 97,28% dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah 91,65% (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal, 2016). Jika dibandingkan dengan target APK dan APM tersebut tentunya terjadi kesenjangan yang cukup tinggi terhadap kesempatan sekolah di Kecamatan Dukuhwaru dimana hal tersebut menandakan belum seluruhnya penduduk usia 13-15 tahun memanfaatkan fasilitas pendidikan jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat di jelaskan bahwa pelayanan fasilitas pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru belum memadai secara kuantitas.

Jika kondisi tersebut hanya dibiarkan tentunya akan menimbulkan ketidaktercapaian target pemerintah yang akan mengakibatkan indeks pembangunan manusia yang rendah.

Penyediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Dukuhwaru telah diupayakan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya masih terjadi ketidakseimbangan antara penyediaan fasilitas pelayanan dengan kebutuhan pelayanan fasilitas pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru. Jumlah sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru sebanyak 6 sekolah yang terdiri dari 5 SMP dan 1 MTs, dimana jika dihitung sesuai standar pelayanan minimum masih mengalami kekurangan dari standar yang telah ditentukan. Hal ini juga terlihat dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kecamatan Dukuhwaru belum terakomodasi sepenuhnya oleh pelayanan sekolah jenjang SMP/MTs. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kecamatan Dukuhwaru sebanyak 3.513 jiwa, sementara jumlah penduduk yang terlayani berdasarkan daya tampung SMP/MTs hanya sebanyak 2.359 jiwa. Berdasarkan perbandingan tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadi ketidakseimbangan pelayanan fasilitas pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru. Selain itu, persebaran fasilitas pendidikan di Kecamatan Dukuhwaru juga kurang merata yang tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat, sehingga diperlukan kajian mengenai analisis kebutuhan dan jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan di Kecamatan Dukuhwaru agar diketahui kebutuhan, daya tampung sekolah dan jangkauan pelayanan mengenai fasilitas pendidikan yang sesungguhnya dan dapat memberikan solusi yang tepat terhadap fasilitas pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ketahun diiringi dengan perkembangan wilayah yang semakin kompleks menyebabkan aktivitas dalam masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sangat diperlukan. Salah satu sarana yang diperlukan oleh masyarakat adalah sarana pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, sarana pendidikan menjadi prioritas utama dalam masyarakat hal ini dikarenakan pendidikan merupakan ujung tombak bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu sarana pendidikan yang memadai menjadi salah satu fasilitas yang menentukan tingkat terpenuhinya masyarakat akan pendidikan. Kecamatan Dukuhwaru adalah salah

satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal yang terdiri dari 10 desa dengan perbedaan kondisi dan karakteristik jumlah penduduk yang berbeda.

Di Kecamatan Dukuhwaru, permasalahan sarana pendidikan yang ada berdasarkan hasil perhitungan standar pelayanan minimum sarana pendidikan yaitu jumlah sarana pendidikan sekolah SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru kurang dari standar yang ada, jumlah SMP/MTS di Kecamatan Dukuhwaru terdiri dari 6 sekolah. Padahal jumlah sekolah yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penduduk mencapai 12 sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs. Hal ini mengakibatkan fasilitas pendidikan yang ada tidak digunakan secara efektif dan tidak efisien. Selain itu, persebaran sekolah di Kecamatan Dukuhwaru tidak merata dan cenderung bergerombol karena jarak yang berdekatan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Persebaran sarana pendidikan yang kurang merata juga menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Dukuhwaru tidak terjangkau pelayanan pendidikan.

Selain itu, sarana pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru juga tidak dapat menampung semua jumlah penduduk yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 13-15 tahun 3.513 jiwa, namun daya tampung sekolah SMP/MTs hanya mampu menampung murid sebanyak 2.359 siswa. Hal ini menyebabkan 1.154 penduduk tidak terlayani akan fasilitas pendidikan jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru. Dari beberapa permasalahan diatas, dapat dirumuskan pertanyaan *yaitu* “*Bagaimana kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan sekolah jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru?* “. Analisis sarana pendidikan yang akan digunakan meliputi analisis kebutuhan akan pendidikan, daya tampung sekolah dan jangkauan pelayanan pendidikan. Hal tersebut perlu di ketahui agar dapat di ketahui sekolah mana saja yang telah memberikan pelayanan secara optimal di Kecamatan Dukuhwaru.

### **1.3 Tujuan dan Sasaran**

Adapun tujuan dan sasaran dalam laporan Analisis Kebutuhan dan Jangkauan Pelayanan Sarana Pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini adalah mengkaji kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan sekolah jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.

### **1.3.2 Sasaran**

Sasaran untuk mencapai tujuan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi jumlah dan persebaran sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.
2. Menganalisis kebutuhan dan daya tampung sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal
3. Menganalisis jangkauan pelayanan sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal
4. Merumuskan kesimpulan dan memberi rekomendasi/saran yang tepat dalam pengembangan sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.




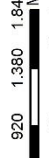
### **1.4 Ruang Lingkup**

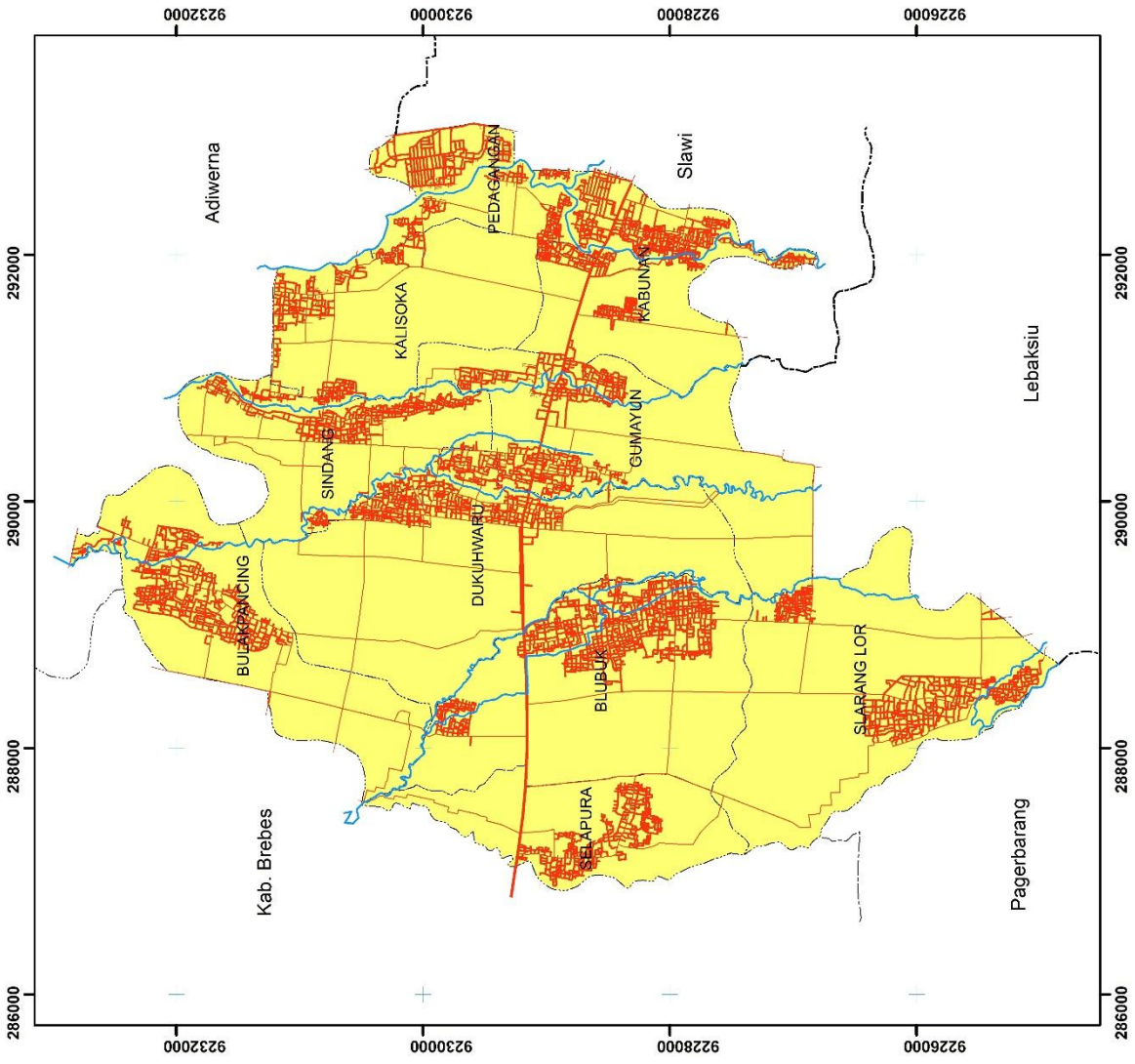
Ruang lingkup yang akan dibahas dalam laporan Proyek Akhir ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah batasan wilayah yang akan di kaji yaitu Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Sedangkan ruang lingkup materi adalah batasan materi yang akan dikaji dalam menganalisis sarana pendidikan SMP/MTs yang ada di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal.

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah kajian meliputi Kecamatan Dukuhwaru yang berada di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Dukuhwaru memiliki luas wilayah sebesar 2.617 Ha yang secara administratif terdiri dari 10 desa yaitu Desa Slarang Lor, Desa Selapura, Desa Dukuhwaru, Desa Blubuk, Desa Bulakpacing, Desa Gumayun, Desa Sindang, Desa Kalisoka, Desa Pedagangan, dan Desa Kabunan. Secara Geografis, Kecamatan Dukuhwaru terletak pada posisi antara 109°07'16" BT - 109°04'20" BT dan antara 6°58'37" LS - 6°58'8" LS. Secara administrasi Kecamatan Dukuhwaru berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Kecamatan Adiwerna
Sebelah Timur	: Kecamatan Slawi
Sebelah Selatan	: Kecamatan Lebaksiu
Sebelah Barat	: Kabupaten Brebes

 <p><b>PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA DEPARTEMEN SIPIL DAN PERENCANAAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO</b></p>		<p><b>TUGAS AKHIR</b></p> <p><b>ANALISIS KEBUTUHAN DAN JANGKAUAN PELAYANAN SARANA PENDIDIKAN SMP/IMTS DI KECAMATAN DUKUHWARU</b></p>	
<p><b>PETA</b></p>		<p><b>ADMINISTRASI KECAMATAN DUKUHWARU</b></p>	
<p><b>KETERANGAN</b></p>		<p><b>Perairan</b></p>	
<p><b>Batas Admininstrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>----- Batas Kabupaten</li> <li>----- Batas Kecamatan</li> <li>----- Batas Desa</li> </ul>		<p>— Sungai</p>	
<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kolektor</li> <li>— Lingkungan</li> <li>— Lokal</li> <li>— Setapak</li> </ul>			
<p><b>INSET</b></p> 	<p><b>ORIENTASI</b></p> 	<p><b>NO. PETA</b></p> <p><b>1.1</b></p>	
<p><b>SKALA</b></p> <p><b>1 : 50.000</b></p>  <p>0 230460 920 1.380 1.840 Meters</p>		<p>Sumber : RTRW Kabupaten Tegal 2011</p>	



### 1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada laporan ini memiliki maksud untuk memperjelas pembatasan materi yang akan di bahas dalam analisis kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru. Ruang lingkup materi wilayah kajian adalah sebagai berikut :

#### 1. Kebutuhan Sarana

Kebutuhan sarana pendidikan sekolah jenjang SMP/MTs dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana pendidikan eksisting dan jumlah permintaan dari penduduk akan sarana pendidikan jenjang SMP/MTs. Analisis kebutuhan sarana pendidikan sekolah jenjang SMP/MTs ini menggunakan pendekatan yaitu :

- a. Jumlah penduduk total dan jumlah penduduk menurut Kelompok Usia sekolah. Jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang dipakai adalah rentang usia 13-15 tahun untuk jenjang SMP/MTs.
- b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) fasilitas pendidikan sekolah menengah yang tertuang dalam SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan dimana penduduk pendukung sarana pendidikan jenjang SMP/MTs adalah 4.800 jiwa.

#### 2. Daya Tampung dan Penyediaan Sekolah

Daya tampung (kapasitas) sekolah adalah banyaknya siswa yang dapat tertampung dalam suatu sekolah. Daya tampung sekolah dilihat dari banyaknya calon siswa yang dapat diterima menjadi siswa dengan mempertimbangkan fasilitas dan daya dukung yang dimiliki suatu sekolah. Perhitungan daya tampung ini akan dianalisis berdasarkan data daya tampung siswa sekolah jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Untuk mengetahui kebutuhan daya tampung sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Selain APK dan APM, Analisis daya tampung juga dapat dilihat dari tingkat keterisian sekolah. Tingkat keterisian sekolah dilihat dengan cara membandingkan jumlah murid persekolah dengan kemampuan daya tampung tiap sekolah di Kecamatan Dukuhwaru. Selanjutnya adalah dengan melihat jumlah rasio jumlah murid per rombongan belajar di tiap sekolah. Rasio jumlah murid per rombongan belajar dapat dilihat dari jumlah rombongan belajar yang tersedia dengan jumlah murid yang bersekolah di tiap sekolah. Sehingga dapat diketahui apakah rasio jumlah murid per rombongan

belajar di tiap sekolah melebihi standar atau bahkan kurang dari standar yang telah ditentukan. Adapun standar jumlah rombongan belajar dan rasio jumlah murid per rombongan belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

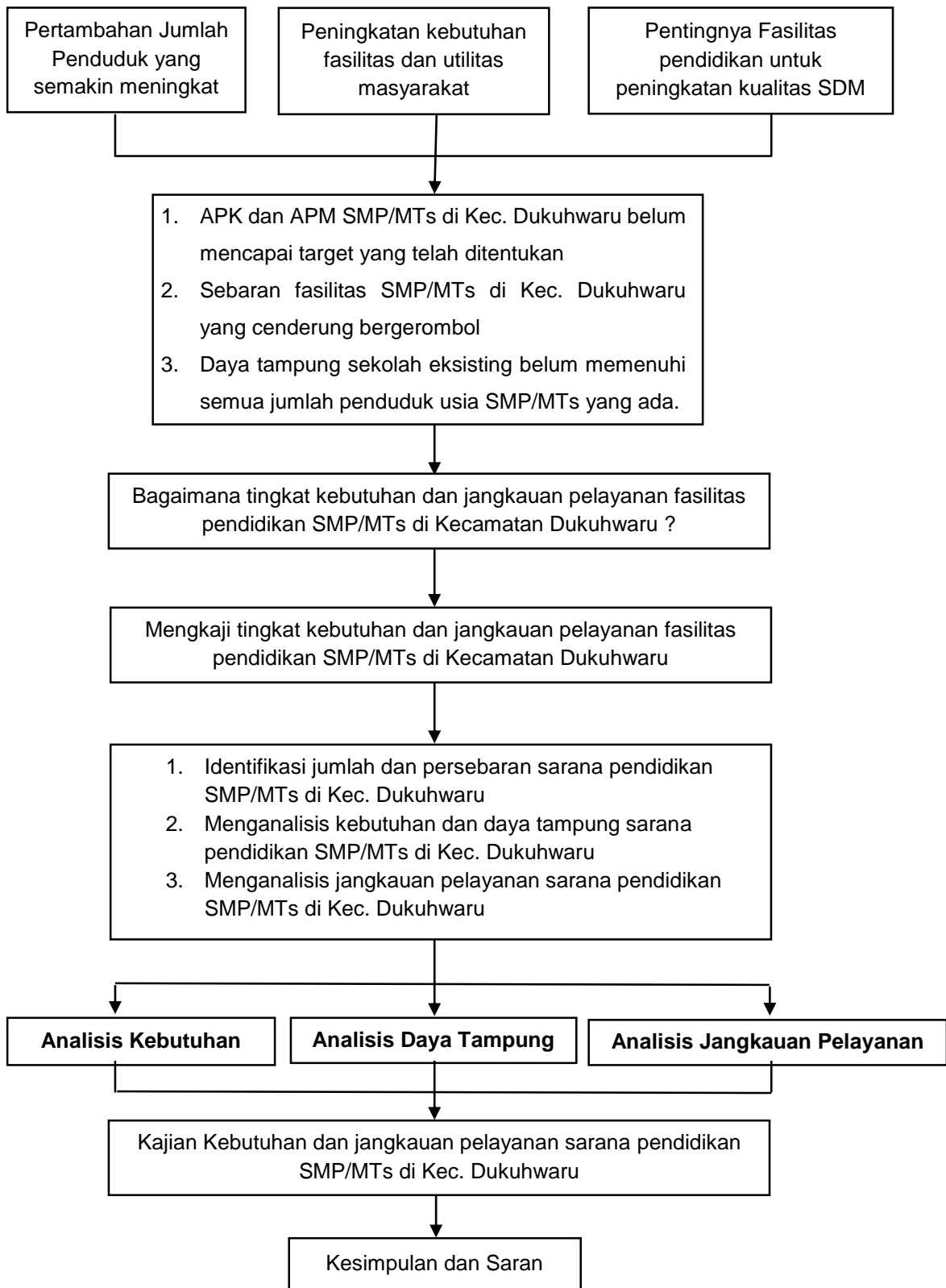
### 3. Jangkauan Pelayanan

Fasilitas sosial sarana pendidikan akan berfungsi secara optimal jika berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah. Aksesibilitas yang mudah dapat dilihat dari jangkauan pelayanan, ketersediaan sarana transportasi dan jarak tempuh dalam mencapai suatu fasilitas sosial yaitu sarana pendidikan. Untuk mengetahui jangkauan pelayanan sarana pendidikan sekolah jenjang SMP/MTs dilihat dari titik persebaran sarana pendidikan sekolah yang kemudian dianalisis menggunakan *network analysis servise area* pada GIS (*Geographic Information System*) dengan mempertimbangkan adanya jaringan jalan, jarak tempuh dan ketersediaan sarana transportasi pada wilayah kajian. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan, standar pendukung untuk fasilitas pendidikan SMP/MTs memiliki radius pelayanan sejauh 1.000 meter. Selain SNI 03-17333-2004 juga dapat dilihat berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 dimana jangkauan siswa SMP/MTs adalah 6 km dengan melalui lintasan yang tidak membahayakan. Sedangkan untuk mengetahui ketersediaan sarana transportasi dapat dilihat dari adanya trayek angkutan umum yang melewati wilayah studi.

## 1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar pemikiran pembuatan laporan proyek akhir. Kerangka pikir juga digunakan untuk mengetahui tahapan dalam penyusunan laporan proyek akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, proses analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi. Berikut merupakan kerangka pikir penulis mengenai analisis kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru.





Sumber : Hasil Analisis, 2018

**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pikir**

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka pikir dan sistematika penulisan laporan.

### **BAB II KAJIAN LITERATUR**

Pada bab ini berisi mengenai kajian literatur atau landasan teori terkait tema proyek akhir yaitu analisis kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan yang meliputi fasilitas sosial pendidikan, kebutuhan sarana pendidikan, daya tampung sekolah dan jangkauan pelayanan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, daerah dan subjek penelitian, kebutuhan data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan kerangka analisis.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM KECAMATAN DUKUHWARU**

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum Kecamatan Dukuhwaru yang meliputi kondisi kependudukan, data siswa, sarana dan prasarana penunjang pendidikan sekolah jenjang SMP/MTs di Kecamatan Dukuhwaru.

### **BAB V ANALISIS SARANA PENDIDIKAN**

Pada bab ini berisi mengenai hasil analisis kebutuhan dan jangkauan pelayanan sarana pendidikan SMP/MTs yang terdapat di Kecamatan Dukuhwaru dengan menggunakan analisis daya tampung, analisis tingkat kebutuhan, dan analisis jangkauan pelayanan.

### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari seluruh isi laporan dan saran untuk sarana pendidikan khususnya jenjang SMP/MTs yang ada di Kecamatan Dukuhwaru.